

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- A.L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Abdul Aziz Nasihuddin, and Kodrat Alam Eko Arief Wibowo, Sulyanati, Kartika Winkar Setya, Nurani Ajeng Tri Utami. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Arditya Wicaksono, Romi Nugroho, M. Natzir Salim. *Penelitian Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat*. Cetakan Pe. Bogor: Puslitbang ATR/BPN Press, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga. *Kecamatan Lingga Timur Dalam Angka Lingga Timur District In Figures*. Edited by BPS Kabupaten Lingga. 12th ed. Kabupaten Lingga: BPS Kabupaten Lingga, 2025.
- Bayu Dwi Anggono. *Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Telaah Kelembagaan*, 2022.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited by Murni. 1st ed. Jakarta Selatan: Damera press, 2022.
- Hendri Jayadi. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2020.
- Irianto, S, and Universitas Leiden. *Kajian Sosio-Legal*, 2012.
- Kesuma, Derry Angling, Yuli Asmara Triputra, Kinaria Afriani, and Tobi Haryadi. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024
- Mawardi Muzamil, Anis Mashdurohatun. *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat Dan Islam)*. Madina Semarang, 2014.
- Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Iur Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. 1st ed. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nurhasan Ismail. , *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*. Yogyakarta: HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007.

Oksidelfa Yanto. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. 1st ed. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

Otto, J.M.; Bedner, A.W.; Irianto, S.; Wirastri, T.D. *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]*. Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen., 2012.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2008.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. “Monitoring Dan Evaluasi Program Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Di Kabupaten Majene,” 2024.

Sigit Sapto Nugroho Anik Tri Haryani dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum Ed. Oleh Sarjiyati*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Soetjipto Raharjo dalam Philipus M. Hudson. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1983.

Umar Anwar, Luluk E Nurrokmah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Nada Afra. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012), 2022.

Wiwik Sri Widiarty. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

B. ARTIKEL ILMIAH

A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, and Herrenaw Universitas. “Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 6 No. 5 (2023).

Akmal, Diya Ul, Hanif Fitriansyah, and Fauzziyyah Azhar Ramadhan. “Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik,” *Jurnal Humaniora*, 4 No. 3 (2023).

Amanda, Miranie Trie, Fepy Supriani, and Annisa Fitria Edriani. “ Analisis Penyediaan Rumah Khusus Untuk Nelayan Dan Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Fasilitas Yang Tersedia (Studi Kasus Rumah Khusus Untuk Nelayan Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan) ” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 20 (2025).

Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.” *Undang: Jurnal*

Hukum 1, No. 1 (2020).

Bachmid, Muhammad Fauzi, Yumi Simbala, and Meiske Mandey. "Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata (Kuh Perdata)" *Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2022).

Candra, Devita. "Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Perlindungan Pihak Ketiga." *Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, No. 3 (2025).

Ch, Mikha, and Kaunang. "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997" *Journal Law* 5, No. 4 (2022).

Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 2 (2022).

Hendriyansah, Yunizar, Sri Zanariyah, Muhammad Lutfi, and Martina Male. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Yuridis Atas Hak Tanah Untuk Mendapatkan Sertifikat Tanah." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2022).

Lukum, Rini, Radia Hafid, and Melizubaida Mahmud. "Pengaruh Perubahan Musim Terhadap Pendapatan Nelayan." *Journal of Economic and Business Education* 1, No. 1 (2023).

Masriani, Yulies Tiena. "Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak" *Journal Education* 5, No. 2 (2020).

Mulada, Diman Ade. "Eksistensi Dan Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik" *Journal Education* 10, No. 1 (2025).

Muna, Zahratul, Jln Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, and Muara Satu. "Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara)" *Jurnal Humaniora* 7, No. 35 (2024).

Putranto, M Ilham Dwi, and Amin Mansyur. "Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12, No. 1 (2023).

Rakyat, Dan Perumahan. "Laporan Kinerja," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 20 (2020).

Ridho, Rasyid, Muhamad Aditya, and R Yuniar Anisa Ilyanawati. "Pendaftaran

Tanah Sertifikat Elektronik” No.4 (2025).

Rosida, Kholifa Ayu. “Implementasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (Sehat) Nelayan Di Desa Agel Kecamatan Agel Kabupaten Situbondo”, *Jurnal Penelitian* 3, No. 6 (2023).

Sitohang, Hotman Januari, Ana Silviana, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, et al. “Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dengan Status Tanah Belum Bersertifikat” *Jurnal Penelitian* 8, No. 17 (2024).

Sultan Pratama Beta. “Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut KUHPerdota dan UUPA No. 5 Tahun 1960” *Jurnal Hukum* 7, No. 5 (2021).

Suyikati. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Kota Yogyakarta.” *Jurnal Widya Pranata Hukum* 1, No. 2 (2022).

Tj, Indra Utama, Muhammad Azhali Siregar, and Muhammad Juang Rambe. “Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan).” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, No. 1 (2022).

Tri Purnama Sari1a, Tuti Kurnia, Anas Alhifhni. “Analisis Aksesibilitas Nelayan Terhadap Pembiayaan Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Nisbah* 8 No. 1 (2022).

Turrodiyah, Aisyah. “Ketidakpastian Hak Kepemilikan Sebagai Penghalang Dalam Penyelidikan Kasus Penggelapan.” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 2 (2025).

Yakob, Melan, Mercy M. M. Setlight, and Djefry W. Lumintang. “Kajian Hukum Asas *Nemo Dat Qui Non Habet* Atas Peralihan Hak Benda Bergerak Dalam Hukum Perdata Di Indonesia” *Jurnal Penelitaian* 15, No. 3 (2025).

Yusuf, Syawal gani, Lesti Heriyanati, and Linda Safitra. “Pemaknaan Nelayan Atas Kemiskinan Kultural” *Jurnal Nisbah* 4, No. 2 (2025).

Zerlina, Zana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Satuan Rumah Susun Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Apartemen *Casa Grande Residence*)” *Jurnal Penelitian* 7 No. 20 (2020).

C. SKRIPSI

Hayati, Zahratul. “Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Khusus Nelayan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Studi Pada Kelompok Nelayan Dikampung Teluk Batil Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak).” Universitas Islam Riau, 2021.

D. UNDANG-UNDANG/PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.*

Pemerintah Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.*

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142.*

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.*

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1210.*

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1092.*

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518.*

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105.*

E. INTERNET

- Christha, Renatha Auli. “Tanah Warisan Belum Bersertifikat, Begini Cara Mengurusnya.”2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanah-warisan-belum-bersertifikat-begini-cara-mengurusnya-lt521ec8e766f1f/>. Diakses Tanggal 31 Desember 2025.
- Dani, Moch. Pratama Huzaini. “Levering Sebagai Dasar Peralihan Hak Milik Secara Hukum” 2024. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt662781e0e7f95/levering-sebagai-dasar-peralihan-hak-milik-secara-hukum/>. Diakses Tanggal 31 Desember 2025.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. “Monitoring Dan Evaluasi Program Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Di Kabupaten Majene,” 2024. https://dkp.sulbarprov.go.id/?page_id=5104. Diakses Tanggal 08 Agustus 2025.
- Hukumonline.com. “Hak Nelayan Di Pesisir Diakui Hukum, Rentan Di Lapangan,” 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-nelayan-di-pesisir-diakui-hukum--rentan-di-lapangan-lt67a5076a7cef6/>. Diakses tanggal 20 Juli 2025.
- LKPN, Admin. “Proses Penghapusan Aset Daerah Yang Benar.” LKPN, 2025 <https://diklatlpkn.id/2025/02/14/proses-penghapusan-aset-daerah-yang-benar/> Diakses Tanggal 01 Januari 2026.
- Perkim.id. “Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, Kebijakan Pembangunan Permukiman Yang Berkeadilan Sosial?,” 2021 <https://perkim.id/permukiman/memaknai-hari-kesaktian-pancasila-kebijakan-pembangunan-permukiman-yang-berkeadilan-sosial/>. Diakses Tanggal 01 Januari 2026.
- R Antares P. “Kementerian PUPR Bangun Rusus Untuk Nelayan Di Kepri.” Tagar.id, 2019. <https://www.tagar.id/kementerian-pupr-bangun-rusus-untuk-nelayan-di-kepri>. Diakses Tanggal 11 Agustus 2025.
- Pandu. “Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Pendapat Para Ahli.” Gramedia.blog, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>. Diakses Tanggal 24 Januari 2026.
- Petriella, Yanita. “Nelayan Bisa Mendapatkan Bantuan Rumah Khusus.” Bisnis.com, 2021. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210317/47/1368843/nelayan-bisa-mendapatkan-bantuan-rumah-khusus#goog_rewarded. Diakses Tanggal 24 Januari 2026.
- Pratama, Maulandy Rizky Bayu. “Nelayan Bisa Dapat Bantuan Rumah Khusus,

Begini Caranya.” Liputan6.com, 2021.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4509093/nelayan-bisa-dapat-bantuan-rumah-khusus-begini-caranya>. Diakses Tanggal 24 Januari 2026.

“Simak! Begini Proses Dan Alur Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik,” 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-begini-proses-dan-alur-penerbitan-sertipikat-tanah-elektronik-lt66611af0bff0f/>. Diakses Tanggal 25 Juli 2025.

F. WAWANCARA

Kabid Kawasan Permukiman Di Kantor PERKIM Kabupaten Lingga, Yaitu Bapak Amirudin, S. Pd. SD. (Wawancara), 16 Desember 2025, Pukul 15.00 WIB (Lingga 2025).

Kepala Desa Keton Di Kantor Desa Keton Kabupaten Lingga, Yaitu Bapak Maulana (Wawancara), 19 Desember 2025, Pukul 11.00 WIB (Lingga 2025).

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Di Kantor BPN Kabupaten Lingga, Yaitu Bapak Taufiq Qurahman (Wawancara), 15 Desember 2025, Pukul 11.00 WIB (Lingga 2025).

Kasubid Perencanaan, Penatausahaan dan Penilaian BPKAD Di Kantor BPKAD Kabupaten Lingga, Yaitu Ibuk Wahidati, A.Md. (Wawancara), 15 Desember 2025, Pukul 15.00 WIB (Lingga 2025).

Masyarakat Penerima Rumah Bantuan Khusus Nelayan Di Desa Keton (Wawancara), 13 Desember 2025, Pukul 11.00 WIB (Lingga 2025).

Sekretaris Desa Keton Di Kantor Desa Keton Kabupaten Lingga, Yaitu Bapak Indra Jaya (Wawancara), 19 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB (Lingga 2025).